

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Program Praktik Kerja Lapangan**

##### **1. Pengertian Manajemen Pendidikan**

Secara etimologis, manajemen berasal dari kata dalam bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* yang artinya “mengendalikan” dan dalam bahasa Inggris *to manage* yang artinya mengatur.<sup>7</sup> Manajemen merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>8</sup> Definisi manajemen sangat luas, sehingga tidak ada definisi manajemen yang digunakan setiap orang secara konsisten.

James A.F Stoner mengemukakan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa Stoner telah mengartikan manajemen sebagai suatu proses. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan George R. Terry, yang menyatakan bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang telah

---

<sup>7</sup> Usman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 1

<sup>8</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal 12

dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>9</sup>

Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama tersebut lebih bermanfaat bagi manusia. Menurutnya manajemen telah memenuhi persyaratan sebagai bidang ilmu pengetahuan karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori.<sup>10</sup> Manajemen dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan karena menggunakan metode ilmiah dan menerapkan disiplin ilmu lain, seperti ekonomi, statistik, dan akuntansi.

Edgard H. Schein mendefiniskan manajemen sebagai profesi dikarenakan manajemen merupakan suatu profesi yang profesional dalam membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan tatus mereka karena pencapaian target prestasi kerja tertentu dan bukan karena favoritisme atau hal-hal yang bersifat subjektif, serta profesi harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat ini manajemen tidak mempunyai makna secara khusus. Sehingga manajemen dapat dipandang sebagai proses, ilmu pengetahuan, seni, dan profesi. Namun seorang manajer harus bisa memilih dan menetapkan konsep manajemen untuk dijadikan patokan sesuai dengan tujuan organisasi

---

<sup>9</sup> Ni Nyoman Resmi, *Gede Suardana, Prngantar Manajemen*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hal 5

<sup>10</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 3

yang mereka pimpin. Pemilihan tersebut memiliki tujuan agar pemimpin dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen.

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) termasuk dalam manajemen hubungan masyarakat. Menurut Amirin, hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan (*goodwill*) secara sadar dan sukarela dalam pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan.<sup>11</sup>

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Secara umum proses kegiatan humas di lembaga pendidikan dengan humas pada umumnya adalah sama, dengan melakukan langkah-langkah dari awal kegiatan hingga akhir sampai juga pada tahap evaluasi.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan pekerjaannya sudah barang tentu seorang praktisi *public relations* akan menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah tugas-tugasnya, seperti membuat rencana, melakukan persiapan-persiapan, melakukan aksi dan komunikasi, dan ditutup dengan pengendalian yang disebut evaluasi.<sup>13</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen hubungan masyarakat di sekolah merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh bidang hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan komunikasi antara lembaga

---

<sup>11</sup> Alfitra, dkk, *Peran Humas Sekolah dalam Membangun Hubungan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri di Sekolah Menengah Kejuruan*, Pinisi Journal of Education, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hlm 66

<sup>12</sup> Alfitra, dkk, *Peran Humas Sekolah dalam Membangun Hubungan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri di Sekolah Menengah Kejuruan*, Pinisi Journal of Education, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hlm 67

<sup>13</sup> Gita Irawanda dan M. Bachtiar, *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat di SMK Negeri Makassar*, Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan, Vol. 1 No. 1 Juni 2020, hlm 28

dengan pihak masyarakat (eksternal) dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.

Fungsi-fungsi manajemen adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dinyatakan oleh George R. Terry, manajemen terdiri dari empat fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning*, adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan.<sup>14</sup> Pada dasarnya kegiatan perencanaan melalui empat tahap berikut:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumuan tujuan yang jelas organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai adalah hal sangat penting. Setelah melakukan analisa keadaan rencana kegiatan dapat dirumuskan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi utama berupa keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

---

<sup>14</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 23

- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Kekuatan dan kelemahan serta hambatan dan kemudahan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan melakukan antiipasi masalah.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan dimana terdapat penilaian dan pemilihan alternatif-alternatif terbaik (paling memuaskan di antara alternatif yang ada).<sup>15</sup>

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat.<sup>16</sup> Dua aspek utama dalam penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal tersebut dapat tercermin dalam struktur formal organisasi atau bagan organisasi. Pembagian kerja merupakan sebuah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang

---

<sup>15</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm 79

<sup>16</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 13

sudah dibatasi. Terdapat tiga langkah prosedur pengorganisasian menurut Ernest Dale, yaitu:

- 1) Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi
- 2) Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logic dapat dikerjakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga dapat terselesaikan, atau tidak terlalu ringan sehingga waktu dan biaya yang diberikan tetap efisien.
- 3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanime untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.<sup>17</sup>

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan atau *actuating*, yaitu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan tujuan menumbuhkan keinginan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Pelaksanaan mempunyai keterkaitan erat dengan sumber daya manusia. Pelaksanaan juga dapat disebut juga penggerakan yang merupakan aktivitas manajer yang berfungsi menggerakkan sumber daya manusia dan mendayagunakan sumber daya non manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat dikatakan penggerakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur kegiatan yang

---

<sup>17</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm 168

telah ditugaskan.<sup>18</sup> Beberapa kegiatan yang termasuk dalam tahap pelaksanaan/penggerakan, antara lain:

- 1) Motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
- 2) Kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Stoner didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang tugasnya saling berhubungan.<sup>19</sup>
- 3) Perubahan dan pengembangan. Perubahan dan pengembangan dalam organisasi merupakan upaya adaptasi dari suatu organisasi agar tetap bertahan saat menemui perubahan (kemajuan teknologi, perubahan sosial ekonomi, dan politik).

d. Pengawasan/ pengendalian (*controlling*)

Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah berjalan sesuai yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah direncanakan.<sup>20</sup> Dalam manajemen, pengawasan terdiri dari beberapa tahapan-tahapan seperti berikut:

- 1) Penetapan standar

Standar merupakan suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Yang dapat digunakan

---

<sup>18</sup> Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2020), hlm 67

<sup>19</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm 294

<sup>20</sup> Ni Nyoman Resmi, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm 8

sebagai ukuran tandar yaitu tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Bentuk standar secara umum adalah standar phisik (kualitas barang/jasa dan jumlah langganan), standar moneter (biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan pendapatan), standar waktu (kecepatan produksi dan tenggat waktu yang ditentukan untuk produksi).

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Agar penetapan tandar tidak ia-sia, maka perlu adanya tahap penentuan pengukuran kegiatan yang didasari oleh beberapa pertanyaan penting berikut: berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur?, dalam bentuk apa pengukuran dilakukan?, siapa yang akan terlibat dalam pengawasan?.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan item monitoring ditentukan, maka pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang melalui pengamatan (observasi), laporan-laporan (lisan dan tertulis), inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. (Djojonegoro, 1998) (Prianto & dkk, 2021) (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik) (Khasanah, 2020) (Irwanto, 2021)

4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan



Pembandingan pelaksanaan nyata dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan merupakan tahap kritis dari pengawasan, karena dapat terjadi penyimpangan saat menginterpretasikan hasil yang didapat.<sup>21</sup>

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Koreksi dapat digunakan apabila hasil analisa memerlukannya. Tindakan koreksi dapat dilakukan dengan cara mengubah standar semula (jika standar dirasa terlalu tinggi), mengubah pengukuran pelaksanaan (jika inspeksi terlalu sering/kurang dan bahkan mengganti sistem pengukuran), mengubah cara menganalisa.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Program Praktik Kerj Lapangan

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.<sup>23</sup>

Menurut Oemar Hamalik adalah Praktik kerja lapangan atau di sekolah sering disebut dengan *on the job training* merupakan model pelatihan yang bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerja. Hal ini sangat berguna sekali bagi para siswa untuk dapat beradaptasi dan siap terjun ke

---

<sup>21</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm 362-364

<sup>22</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm 365

<sup>23</sup> Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan: aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah atau madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 349

dunia kerja, sehingga di dalam bekerja nantinya dapat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.<sup>24</sup>

Menurut Djojonegoro (1998), praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari program pendidikan kejuruan yang dilaksanakan oleh peserta didik dengan harapan dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan melalui proses pembelajaran di sekolah serta sekaligus mempelajari dan beradaptasi pada dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian tertentu.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Program Praktik Kerja Lapangan**

Menurut Hamalik (2001), praktik kerja lapangan bertujuan untuk mempersiapkan dan membina tenaga kerja baik struktural maupun fungsional yang memiliki kemampuan melaksanakan loyalitas, kemampuan melaksanakan dedikasi dan kemampuan berdisiplin yang baik.

Menurut Djojonegoro (1998), tujuan praktik kerja lapangan antara lain yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Hamalik Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 21

<sup>25</sup> Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, (Jakarta: Jayakarta Agung, 1998), hlm 79

- 1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- 2) Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja.
- 3) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional, dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan yang ada di dunia kerja.
- 4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.<sup>26</sup>

Selain tujuan PKL yang disebutkan oleh Djojonegoro tersebut, terdapat penjelasan lain dari buku pedoman pelaksanaan prakerin, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.
- 2) Memperkenalkan dunia usaha/industri kepada peserta didik.
- 3) Memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik dalam mengaplikasikan kejuruan yang diperoleh dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dunia usaha/dunia industri.

---

<sup>26</sup> Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan*, (Jakarta: Agung Offset, 1998), hlm 80

- 4) Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif dan dapat langsung bekerja dibidangnya setelah melalui pendidikan dan latihan berbasis kompetensi.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik sehingga memiliki daya saing tenaga kerja dipasar kerja global.
- 6) Menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai warga Negara yang produktif.
- 7) Menumbuh kembangkan nilai-nilai yang diterapkan dalam hal kedisiplinan dalam bekerja.
- 8) Mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetensi beradaptasi dalam lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya
- 9) Untuk menanamkan jiwa *entrepreneurship*.<sup>27</sup>

Adapun manfaat dari program PKL telah di ebutkan oleh Hamalik, seperti: a) menyediakan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilan manajen situasi lapangan yang aktual, b) memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada siswa sehingga hasil penelitian bertambah luas, c) siswa berkesempatan memecahkan berbagai permasalahan manajemen di lingkungan lapangan dengan mendayagunakan kemampuannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Agus Prianto, dkk, *Seri Pendidikan SMK: Pembelajaran Aktif Berbasis Kerja di SMK*, (Pustaka Ilmu, 2021), hlm 12

<sup>28</sup> Hamalik Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 92-93

Selain itu manfaat dari program Praktik Kerja Lapangan juga dikemukakan oleh Firdaus (2012). Beberapa manfaat dari pelaksanaan praktik kerja lapangan, sebagai berikut:

- 1) Memberikan bekal keahlian yang profesional untuk terjun kelapangan kerja dan untuk bekal pengembangan dirinya secara berkelanjutan.
- 2) Rentang waktu untuk mencapai keahlian profesional lebih singkat, karena setelah selesai prakerin tidak perlu mengikuti latihan lanjutan untuk mencapai keahlian siap pakai.
- 3) Keahlian yang diperoleh dari program prakerin dapat mengangkat harga dan percaya diri dalam mendorong mereka untuk meningkatkan keahliannya pada tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tentang beberapa manfaat program praktik kerja lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa program praktik kerja lapangan sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam menumbuhkan rasa percaya diri karena dalam program tersebut peserta didik dapat mengembangkan kemampuan (*skill*) yang mereka miliki, serta dapat mengenali lingkungan kerja sehingga menumbuhkan kesiapan kerja peserta didik setelah lulus sekolah.

## **5. Dasar Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan**

Penyelenggaraan program PKL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik yang berbunyi “Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah

pembelajaran bagi peserta didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja.”<sup>29</sup>

Dasar penyelenggaraan PKL juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Pasal 10 yang berisi tahapan-tahapan pelaksanaan PKL, meliputi: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) penilaian, d) monitoring dan evaluasi.<sup>30</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan pada SMK/MAK, SMALAB, dan LKP bertujuan memberikan pembelajaran berupa praktik kerja langsung kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu dan dilaksanakan langsung di industri, dunia usaha, maupun dunia kerja. Sesuai kurikulum yang berlaku dan kebutuhan dunia kerja.

Pengaturan kegiatan-kegiatan PKL telah diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik, adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan perencanaan PKL

Perencanaan PKL telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Pasal 10

Tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik pada Pasal 11, yang menyebutkan:

- 1) Pemetaan kompetensi peserta didik;
- 2) Penetapan lokasi PKL;
- 3) Penetapan jangka waktu PKL;
- 4) Pemetaan penempatan peserta didik sesuai kompetensi;
- 5) Penetapan pembimbing PKL; dan
- 6) Pembekalan peserta didik.<sup>31</sup>

b. Kegiatan pelaksanaan PKL

Kegiatan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Pasal 12 adalah:

- 1) Penempatan peserta didik di dunia kerja sesuai kompetensi;
- 2) Praktik kerja; dan
- 3) Monitoring oleh pembimbing PKL dari dunia kerja.<sup>32</sup>

c. Kegiatan penilaian PKL

Penilaian dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kompetensi peserta didik diatur dalam pasal 13, meliputi aspek:

- 1) Sikap;
- 2) Pengetahuan; dan
- 3) Keterampilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Pasal 11

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Pasal 12

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Pasal 13

d. Kegiatan monitoring dan evaluasi PKL

Tahap monitoring dan evaluasi berisi kegiatan yang telah dicantumkan dalam pasal 14, yang meliputi:

- 1) Monitoring terhadap pelaksanaan PKL; dan
- 2) Evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaan PKL.<sup>34</sup>

Dasar pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga diatur secara jelas dalam buku “Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dibawah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023. Pada bagian strategi implementasi dijelaskan bahwa pada konsentrasi keahlian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) praktik kerja dapat dilaksanakan secara daring dengan pengawasan dari dunia kerja. Dan untuk kompetensi keahlian lain dilaksanakan secara luring. Dan menyesuaikan untuk keadaan lainnya. Jika peserta didik secara terpaksa tidak dapat melaksanakan PKL maka dapat diganti dengan kegiatan pengganti berupa kegiatan kewirausahaan, pembelajaran berbasis proyek melalui model *teaching factory*,

Dalam buku panduan juga mengatur jangka waktu pelaksanaan praktik kerja yaitu pada SMK 3 tahun dilaksanakan selama minimal 6 bulan atau setara dengan 792 jam pelajaran (JP) yang dapat dilaksanakan di semester

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Pasal 14



5 dan 6. Sedangkan pada SMK 4 tahun dilaksanakan selama minimal 10 bulan atau 1.368 jam pelajaran.<sup>35</sup>

## **B. Link and Match**

### **1. Pengertian Link and Match**

Konsep *link and match* berasal dari teori pembelajaran behavioral yang muncul pada awal abad ke-20, kemudian konsep behavioral dikenal dengan pembelajaran *learning by doing*. Teori pembelajaran tersebut memiliki tujuan yang sama dengan konsep *link and match*, yaitu menghendaki agar proses belajar berjalan dengan melakukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Dengan teori belajar yang demikian diharapkan seseorang dapat memiliki pengalaman belajar aktual, empirik dan nyata. Dengan proses belajar yang demikian maka dapat dikatakan mencerminkan keadaan *link and match*.<sup>36</sup>

*Link and match* merupakan kebijakan kementerian pendidikan republik Indonesia yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djoyonegoro pada tahun 1989-1998 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Konsep tersebut mengacu pada *link and match* kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.<sup>37</sup>

Konsep *link and match* mempunyai sasaran di mana telah dijelaskan oleh Soesilowati, dkk (2009) bahwa pada tingkat sekolah menengah berupa

---

<sup>35</sup> Mochamad Widiyanto, dkk, *Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*, (Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2023), hlm 10

<sup>36</sup> Uswatun Khasanah, *Journal Link and match program with business and industry (DU/DI) as an effort or placement of graduate at SMK Muhammadiyah Delangu*, Journal o Islam and Science, Vol. 7 No. 2, Desember 2020, hlm 5

<sup>37</sup> Septiana Dewi Cahyanti, dkk, *Jurnal implementasi program link and match dengan dunia industri pada lulusan pemasaran SMKN 1 Surakarta*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hlm 5

perubahan proporsi SMU dengan SMK dari yang semula 70:30 menjadi 30:70. Maksud dari pernyataan tersebut adalah proporsi antara teori (pembelajaran) dengan praktik yang diterapkan pada sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan berbeda. Jika pada sekolah umum porsi pembelajaran teoritis lebih banyak dibanding pembelajaran praktik, dengan perbandingan 70:30. Namun pada sekolah kejuruan pembelajaran teoritis lebih sedikit porsinya jika dibanding dengan pembelajaran praktik, dengan perbandingan 30:70.<sup>38</sup>

## **2. Indikator Link and Match**

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan menurut Callan dan Ashworth (2004) adalah bahwa hubungan tersebut terjadi apabila, terpenuhinya hal-hal berikut:

- 1) Adanya suatu keterkaitan antara kurikulum pendidikan kejuruan dengan dunia industri untuk bisa mempersiapkan tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan agar saling memberi dan menerima, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak.
- 2) Kerja lapangan ke dunia industri merupakan pengalaman yang diberikan kepada peserta didik maupun kepada guru sebagai tenaga pendidik di sekolah kejuruan, supaya teori yang diberikan dalam pembelajaran diekolah dapat di praktikkan pada dunia industri. Selain peserta didik, guru berperan penting untuk menyerap ilmu dari dunia kerja untuk diimplementasikan pada pembelajaran dikelas

---

<sup>38</sup> Ibid, Septiana Dewi Cahyati, hlm 6

- 3) Adanya penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh dunia kerja. Seharusnya dunia kerja dapat memberdayakan langsung hasil dari pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.<sup>39</sup>

Pendapat dari Callan dan Ashwort juga sejalan dengan pendapat dari Wahjosumidjo yang mengutarakan bahwa adanya kerja sama antara pendidikan kejuruan dan dunia kerja akan menghasilkan keesuaian antara kurikulum yang ada di dunia pendidikan kejuruan di kesesuaian antara isi program dengan berbagai macam keterampilan produksi yang diperlukan pihak dunia kerja terutama dunia industri, peserta didik melakukan suatu kerja praktik lapangan dengan membuka kesempatan kepada industri, dengan adanya kerjasama maka akan memantapkan suatu hubungan antara pihak pendidikan kejuruan dengan pihak industri untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh kedua pihak.<sup>40</sup>

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan bagian dari upaya *link and match*, mengingat fungsi dari salah satu dunia kerja, yakni dunia industri bagi SMK seperti yang telah dijelaskan oleh Pardjono (2011) sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat praktik siswa

Industri sering digunakan sebagai tempat praktik dengan alasan bahwa saat ini tak banyak dari SMK yang memiliki peralatan dan mesin praktik yang memenuhi standar kompetensi atau tujuan yang ditentukan.

---

<sup>39</sup> Irwanto, *Jurnal link and match pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri di Indoneia, Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 2 No.2, Juli 2021, hlm 9

<sup>40</sup> Irwanto, *Jurnal link and match pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri di Indoneia, Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 2 No.2, Juli 2021, hlm 9 (Simanjuntak) (Soeharto)

2) Sebagai tempat magang kerja

Magang dalam beberapa istilah sering dikenal dengan *apprentice*. Lee menyatakan bahwa: “*A job, in a skilled occupation, that requires substantial and sustained training, leading to the achievement of an apprenticeship standard and the development of transferable skills to progress careers*” (2016: 325). Sistem magang (*apprentice*) merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang dalam memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit daripada yang diajarkan selama menempuh pendidikan di sekolah.

3) Sebagai tempat belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja

Selama ini, industri dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Selain melakukan pengamatan langsung ke tempat kerja, siswa juga bisa belajar tentang manajemen dan organisasi industri sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Selain itu, juga bisa menambah wawasan siswa pada dunia wirausaha.

Selain indikator ketercapaian kompetensi juga terdapat indikator terwujudnya program *link and match* menurut Tilaar sebagai berikut:

1) Pengembangan kurikulum pendidikan

Kurikulum pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat, artinya lembaga pendidikan dituntut untuk mendekatkan diri dengan dunia industri guna mengadakan

pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

2) Peningkatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang industri dan praktik – praktik lainnya, dengan begitu upaya meningkatkan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dapat terwujud sehingga dalam melaksanakan kebijakan *link and match* akan lebih mudah.<sup>41</sup>

3) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar

Tenaga pengajar harus dapat bersaing dengan tenaga – tenaga yang ada di dunia kerja. Selain itu, perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri dan sebaliknya tenaga industri diberikan kesempatan untuk mengabdikan di dunia pendidikan dalam waktu tertentu.

4) Perbaikan program pendidikan

Program yang dimaksudkan adalah program yang mengarah pada kebutuhan masyarakat dengan tujuan terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya relevansi program pendidikan diharapkan kebijakan *link and match* dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Septiana Dewi Cahyanti, dkk, *Jurnal implementasi program link and match dengan dunia industri pada lulusan pemasaran SMKN 1 Surakarta*, Vol. 4 No. 1, hlm 5

<sup>42</sup> Septiana Dewi Cahyanti, dkk, *Jurnal implementasi program link and match dengan dunia industri pada lulusan pemasaran SMKN 1 Surakarta*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hlm 5

Dalam kurikulum merdeka, bentuk keselarasan antara Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Pusat Keunggulan (SMK PK) dengan dunia kerja dapat dilihat melalui *Link and Match* 8+i yang meliputi:

1. Kurikulum disusun bersama dengan industri
2. Pembelajaran berbasis projek riil dari dunia kerja
3. Jumlah dan peran guru/instruktur industri dan ahli dari dunia kerja minimal 50 jam
4. Praktik kerja lapangan minimal 1 semester
5. Sertifikat kompetensi
6. Update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur
7. Riset terapan mendukung *teacing factory*
8. Komitmen serapan lulusan
9. Beasiswa dan atau ikatan dinas, donasi alat, dll.<sup>43</sup>

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya *link and match* dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti adanya sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan dunia kerja, adanya hubungan timbal balik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dalam pemenuhan tujuan kedua belah pihak, dan adanya keterserapan lulusan pada dunia kerja sesuai dengan program keahlian di sekolah

### **3. Dunia Kerja**

Dunia kerja atau lingkungan kerja merupakan iklim dimana seseorang melakukan aktivitasnya. Lingkungan kerja dalam setiap instansi sangat

---

<sup>43</sup> Sugiarti, Manajemen Sekolah Melalui Konsep Link and Match 8+I dalam Meningkatkan Daya Serap Lulusan SMK Pusat Keunggulan, Best Practise program pengembangan keprofesionalan kepala sekolah SMK PB. Soedirman 1 Jakarta Tahun 2022. Hlm 16-17

berbeda-beda dan mempunyai kekhasan tersendiri. Menurut Nitisemito, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban.

Sedangkan pendapat lain dimunculkan oleh Simanjuntak, yang mendefinisikan lingkungan kerja sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitar dimana seorang bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun ebagai kelompok.<sup>44</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah sesuatu yang yang berada diekitar pekerja yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja anggota termasuk failitas, rekan kerja, dan metode bekerja yang diterapkan pada setiap tempat kerja. Dunia kerja yang paling berkaitan dengan pendidikan kejuruan yaitu Dunia Industri dan Dunia Usaha (DU/DI) dimana keduanya merupakan penghasil lapangan pekerjaanyang paling dominan untuk menyerap lulusan dari sekolah menengah kejuruan. Definisi dari industri telah dijabarkan dalam Permenperin No. tahun 2017, definisi industri “Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Sedangkan, definisi dari perusahaan inustri adalah “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri”.

---

<sup>44</sup> Payaman J. Simanjuntak, *Produktivitas Kerja dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Prisma Sugiyono, 2004), hlm 39

## C. Sekolah Menengah Kejuruan

### 1. Pengertian SMK

Pengertian mengenai pendidikan kejuruan telah didefinisikan oleh beberapa ahli. Salah satunya pendapat dari Anane (2013) yang memiliki pandangan bahwa pendidikan vokasional adalah *Vocational and Technical Education (VTE) systems play a vital role in the social and economic development of anation*. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasional memiliki peranan yang sangat vital di bidang ilmu social dan pengembangan ilmu ekonomi di suatu negara. Di Indonesia pendidikan vokasional mempunyai tujuan mempersiapkan peserta didik agar mempunyai keahlian dan kesiapan dalam bekerja, sehingga diharapkan mereka dapat hidup sejahtera dengan mengandalkan kompetensi yang dimilikinya.<sup>45</sup>

Soeharto (1988) mengemukakan pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya atau materi pelajarannya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri, atau untuk bekerja sebagai bagian dari suatu grup kerja.<sup>46</sup>

Menurut Ningsih, pendidikan kejuruan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan proses pembelajaran keahlian tertentu beserta evaluasi berbasis kompetensi yang mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja setingkat teknisi. Jenjang pendidikan tersebut dapat bernama Sekolah

---

<sup>45</sup> Irwanto, *Jurnal link and match pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri di Indoneia*, Jurnal Inovasi Pendidikan, Vol. 2 No.2, Juli 2021, hlm 2

<sup>46</sup> Soeharto, *Desain Instruksional Sebuah Pendekatan Praktis untuk Pendidikan Teknologi dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi), hlm 10



Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah menengah kejuruan merupakan rangkaian sebuah proses pendidikan yang tak lepas dari dimensi input, proses, dan output. Serangkaian kegiatan yang melibatkan aktivitas peserta didik yang diharapkan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan dapat bersaing dalam dunia industri maupun dunia usaha.<sup>47</sup> Calfrey C. Calhoun berpendapat bahwa definisi pendidikan kejuruan menurut The United Congress adalah: *“Vocational education as organized educational programs which are directly related to the preparation of individuals for paid or unpaid employment, or for additional preparation for a career require other than a baccalaureate of advanced degree.”* Yang dapat artikan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional maupun untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Pusat *Vocational Education Training* (VET) regional memiliki tanggung jawab pada keseluruhan proses pembelajaran serta untuk pemberian kualifikasi.<sup>48</sup>

## 2. Karakteristik SMK

Menurut Djojonegoro (1998:37) karakteristik pendidikan kejuruan antara lain: (1) pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja; (2) pendidikan kejuruan didasarkan atas “demand-driven” atau kebutuhan dunia kerja; (3) fokus isi pendidikan

---

<sup>47</sup> Nur Anisah, dkk, *Link and Match Pendidikan Sistem Ganda Dalam Program Praktek Kerja Indutri SMK Islam Terpadu*, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universita Negeri Jakarta, 2020, hlm 355

<sup>48</sup> Septiana Dewi Cahyanti, dkk, *Jurnal implementasi program link and match dengan dunia indutri pada lulusan pemasaran SMKN 1 Surakarta*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hlm 6

kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja; (4) penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada “*hands-on*” atau performa dalam dunia kerja; (5) hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci kesuksesan pendidikan kejuruan; (6) pendidikan kejuruan yang baik adalah responsive dan antiipatif terhadap kemajuan teknologi; (7) pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “*learning by doing*” dan “*hand-on experience*”; (8) pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik; (9) pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pada pendidikan umum.<sup>49</sup>

Karakteristik SMK dapat dilihat dari tujuan pendidikan, substansi pelajaran, tuntutan pendidikan dan lulusan, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Tujuan pendidikan kejuruan yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai program keahlian. Pendidikan kejuruan juga bertujuan sebagai stimulus berupa pengalaman belajar siswa dalam mengembangkan potensinya melalui interaksi dengan dunia luar “*learning by doing*”.<sup>50</sup>
- b) Kontek sosial pendidikan kejuruan, dengan arti tujuan dan isi pendidikan kejuruan juga dibentuk dari kebutuhan masyarakat. Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat

---

<sup>49</sup> Wardiman Djojonegoro, Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1998), hlm 37

<sup>50</sup> Rien Riany, Karakteristik dan Tuntutan Perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Statement*, Vol. 02, No. 2 Oktober 2012, hlm 83

dan berperan sebagai media peletari budaya serta media terjainya perubahan sosial.

- c) Dimensi ekonomi pendidikan kejuruan dapat dilihat dari kerangka investasi dan nilai balik (*value of return*) dari hail pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan juga memiliki tingkat balik (*rate of return*) lebih cepat dibanding pendidikan umum, karena lulusan pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang menyangkut pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.<sup>51</sup>

Karakteristik pendidikan kejuruan mengacu pada pengertian dari pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didiknya memauki dunia kerja. Dari pengertian tersebut, maka karakteristik pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang membekali segala yang dibutuhkan peserta didiknya menguasai kompetensi profesional, sehingga karakteristik pembelajarannya didasarkan pada pembelajaran teori dan praktik.

### **3. Dasar Penyelenggaraan SMK**

Penyelenggaraan program Praktik Kerja Lapangan telah diatur dalam UU RI Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 yang berisi tentang jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa: 1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 2) pendidikan profesi merupakan pendidikan profesi merupakan

---

<sup>51</sup> Ibid, Rien Rianny, hlm 84

pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 3) pendidikan vokai merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.<sup>52</sup>

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 yang berisi bahwa pendidikan kejuruan merupakan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Penyelenggaraan pendidikan SMK dilaksanakan dalam kurun waktu tiga atau empat tahun disesuaikan dengan kebutuhan tingkat penguasaan kompetensi keahlian. Penyelenggaraan dilakukan secara terintegrasi antara teori dan praktik yang dilaksanakan di sekolah maupun pada IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Basuki Wibawa, Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm 63

<sup>53</sup> Darmawan Sumantri, Pengelolaan Pendidikan Kejuruan: Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 Tahun, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017), hlm 13-14